



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI

(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat	:	Ke – 28 (dua puluh delapan)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat dengan:
Dengan	:	1. Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kemen HAM 2. Ketua LPSK 3. Ketua Komnas HAM
		Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan: Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan di Riau
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari, tanggal	:	Senin, 29 September 2025
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Gedung Nusantara II, Lt.3
Acara	:	Membahas Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
Ketua Rapat	:	Sugiat Santoso, SE., M.S.P. (Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI/Fraksi Partai Gerindra)
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si

Hadir	:	14 orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII DPR RI Izin 28 Anggota Komisi XIII DPR RI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM-Kemen HAM 2. Ketua LPSK 3. Ketua Komnas HAM 4. Ketua Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan di Riau, dan anggota aliansi

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM-Kemen HAM, Ketua LPSK, Ketua Komnas HAM, dan **Rapat Dengar Pendapat Umum** dengan Ketua Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan di Riau, dan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan, dan Forum Desa Korban Tata Kelola Hutan Pertanahan Riau pada Senin, 29 September 2025 dengan agenda “Membahas Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau” dibuka pada pukul 11.00 WIB, dan dipimpin oleh **Sugiat Santoso, S.E., M.S.P.**, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dan rapat dinyatakan **terbuka** untuk umum.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi XIII DPR RI Menolak relokasi warga yang berada dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau karena melanggar Hak Asasi Manusia.
2. Komisi XIII DPR RI meminta agar Satgas PKH tidak menghadapkan Aparat Negara (TNI, POLRI) berhadapan dengan masyarakat dalam penyelesaian persoalan di Taman Nasional dan Tata Kelola Hutan dan Pertanahan di Provinsi Riau.
3. Komisi XIII DPR RI Merekomendasikan Kementerian HAM RI memimpin koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK dan Lembaga terkait lainnya untuk memastikan penyelesaian atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik tata kelola Hutan dan Pertanahan di Provinsi Riau.
4. Komisi XIII DPR RI akan Mendorong Kasus konflik kepemilikan tanah dan hutan di Provinsi Riau, Menjadi Prioritas untuk ditindaklanjuti oleh Panitia

Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan di bentuk oleh DPR RI pada Sidang Paripurna tanggal 2 Oktober 2025 yang akan datang.

5. Komisi XIII DPR RI Berkomitmen mengawal secara serius implementasi penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM yang dipimpin oleh Kementerian HAM RI dan Penyelesaian permasalahan hukum terkait kepemilikan tanah atau hutan di Provinsi Riau melalui Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.30 WIB

**DIRJEN PELAYANAN DAN KEPATUHAN
KEMENTERIAN HAM,**

KETUA RAPAT

TTD

TTD

MUNAFRIZAL MANAN

SUGIAT SANTOSO, SE., M.S.P.
A-73

KETUA LPSK

KETUA KOMNAS HAM

TTD

TTD

Dr. ACHMADI, SH., M.A.P.
BRIGJEN POLISI (PURN)

ANIS HIDAYAH